



Contents lists available at Jurnal IICET

Jurnal Konseling dan Pendidikan

ISSN: 2337-6740 (Print) ISSN: 2337-6880 (Electronic)

Journal homepage: <http://jurnal.konselingindonesia.com>



Implementasi kebijakan pembelajaran daring di kota Pontianak

Sri Haryaningsih¹, Ira Patriani¹, Farah Devi Andriani¹

¹Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jun 12th, 2022

Revised Aug 20th, 2022

Accepted Aug 26th, 2022

Keyword:

Implementasi
pembelajaran daring
Virus covid-19

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembelajaran daring di Kota Pontianak. Pelaksanaan model pembelajaran daring selama pandemi virus Covid-19 ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemerintah Kota Pontianak penerbitan surat edaran No 13/DIKDIBUT/ Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pendidikan Pada Masa Darurat Penyebaran Virus Corona (Covid-19) tahun yang dikeluarkan oleh Kota Pontianak dalam upaya pencegahan covid-19. Implementasi pembelajaran daring di rumah ini menggunakan media whatsapp, google classroom atau zoom. Fokus dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut George Edward III yaitu Komunikasi (communication), Sumber Daya (Resources), Disposisi (Disposition) dan Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi yang terjadi di jajaran Pemerintah Kota Pontianak dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sudah cukup baik, terlihat dalam penerbitan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kota Pontianak dalam upaya pencegahan covid-19, selanjutnya di respon oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak dengan mengeluarkan surat edaran perihal pencegahan covid-19 dengan meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah dan mengintruksikan untuk belajar di dalam rumah. Ada beberapa kendala yang dialami saat melaksanakan kebijakan pembelajaran daring, seperti keterbatasan akses jaringan internet di beberapa wilayah di kota Pontianak, dengan adanya pembelajaran daring ini juga bisa memberatkan orang tua siswa karena harus mempunyai gadget beserta kuota internet untuk mengaksesnya. Ada beberapa Siswa yang kesulitan dalam mengakses materi yang diberikan secara onlinen karena tidak memiliki kuota.



© 2022 The Authors. Published by Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET). This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Corresponding Author:

Haryaningsih, S.,

Email: sri.haryaningsih@fisip.untan.ac.id

Pendahuluan

Pada 11 Maret 2020 lalu, World Health Organization (WHO) mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus corona 2019 atau yang juga disebut corona virus disease 2019 dilansir CNBC, Kamis (12/3/2020). Pandemi berarti wabah penyakit yang menyerang banyak korban dan terjadi serempak di berbagai negara. Sementara itu badan kesehatan dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terinfeksi COVID-19. Penyakit ini menjadi penyakit yang mematikan karena merupakan virus baru yang belum ditemukan vaksin dan obatnya. Karena belum ditemukannya vaksin dan obat untuk COVID -19 menyebabkan terjadinya pertarungan sengit antara manusia dengan COVID-19, dimana ia yang memiliki antibodi kuat akan menang dan bisa sembuh atau bahkan tidak terinfeksi dan begitupun sebaliknya, yang memiliki antibodi lemah maka ia akan kalah.

Berbagai elemen masyarakat, lembaga swadaya, pemerintah hingga Badan Kesehatan Dunia (WHO) bahu-membahu memberikan informasi akurat mengenai Corona COVID19 beserta penyebaran dan cara pencegahannya Menurut data yang di kumpulkan oleh Worldometers (worldometers.info, 2020) menunjukkan hingga 7 April 2020 pukul 18.00 WIB, total angka kasus positif COVID-19 di dunia telah mencapai lebih dari 1,3 juta pasien. Lebih dari 75 ribu nyawa melayang akibat infeksi virus ini. Meski begitu terdapat sekitar 293 ribu

pasien berhasil sembuh dan memulai lagi kehidupan normal seperti sedia kala. Indonesia sempat mencapai tingkat kematian tertinggi yaitu sekitar 9,11 persen pada Sabtu, 4 April 2020. Saat ini, berdasar data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Selasa, 7 April 2020), angka tersebut turun menjadi 8 persen. Tapi tetap masih lebih tinggi dibanding angka kematian global sebesar 5,7 persen. (tirto.id, 2020).

Pemberlakuan Social Distancing ini menjadi polemik bagi masyarakat, karena menyebabkan kerugian finansial maupun non finansial. Selain itu karena dengan adanya sosial distancing ini maka beberapa kegiatan menjadi terhambat, dibatalkan dan harus dilakukan secara jarak jauh. Beberapa bidang kegiatan tersebut antara lain perekonomian, industry, kesehatan, pendidikan dan transportasi. Dengan adanya jumlah korban covid-19 yang terus bertambah maka beberapa bidang kegiatan yang biasanya dilaksanakan diluar rumah menjadi di dalam rumah atau work from home (WFH). Salah satu bidang tersebut yaitu bidang Pendidikan. Didalam bidang pendidikan pemerintah mengambil kebijakan terkait pembelajaran daring bagi semua tingkat pendidikan baik itu TK, 19 SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Kebijakan ini dipilih untuk meminimalisir korban covid-19 agar tidak berjatuhan lebih banyak lagi.

Semua instansi pendidikan baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi terpaksa harus diliburkan untuk mengurangi tersebarnya wabah Covid19. Namun, hal ini tidak sematamata berarti peserta didik dan atau mahasiswa libur dan tidak melakukan pembelajaran. Pemerintah dalam menangani hal ini mengambil langkah untuk membuat kebijakan bahwa peserta didik dan atau mahasiswa melakukan belajar di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dengan sistem online. Hal ini disampaikan melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan, Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID19), Surat Edaran dan petunjuk dari Kepala Daerah, dan Rektor masing-masing Universitas, serta Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19).

Implementasi Kebijakan publik di bidang pendidikan dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan keputusan yang mana telah diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Kebijakan publik bidang pendidikan meliputi anggaran pendidikan, kurikulum, rekrut-men tenaga kependidikan, pengembangan profesional staf, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan lain yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung atas pendidikan. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi Edward III, dengan mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan, yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan disposisi. Teori Implementasi Edward III ini dinilai relevan karena variabel dalam teori tersebut dapat mencakup seluruh data yang dibutuhkan oleh penulis terkait pelaksanaan kebijakan Pendidikan daring di Kota Pontianak. Untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksana harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasi mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sasarannya. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan media masa, elektronik, sosial dll.

Sejak pandemi COVID-19 ini, kebijakan yang sudah direncanakan mengalami perubahan meskipun telah di masak matang oleh Pemerintah khususnya oleh Kemendikbud. Dengan berbagai pertimbangan hingga membuat keputusan itu diambil salah satunya terkait dengan kesehatan siswa dan guru. Dengan hal ini pun pembelajaran yang pula dilaksanakan dikelas juga dilaksanakan secara online. Dengan keterbatasan ruang, siswa dan guru berinteraksi melalui alat komunikasi. Implementasi pembelajaran Daring ini dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam meminimalisir jatuhnya korban yang lebih banyak lagi. Fokus yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut George Edward III yaitu Komunikasi (communication), Sumber Daya (Resources), Disposisi (Disposition) dan Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure).

Selain informasi yang mampu menjadikan kebijakan berhasil adalah sumber daya yang dimiliki oleh implementator. Sumber daya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya. Bahkan kebijakan tersebut akan menjadi dokumen saja. Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Faktor-faktor mengenai disposisi implementasi kebijakan oleh (Edward III dalam Agustino, 2006) adalah pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan mengakibatkan permasalahan yang akan timbul pada implementasi kebijakan jika personilnya tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan atau pengangkatan personil untuk melaksanakan kebijakan adalah

orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya pada kepentingan masyarakat.

Metode

Metode penelitian adalah sebuah tata cara, langkah, atau prosedur yang ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan penelitian yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Seperti yang diungkapkan Sugiyono (2018:2) menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada sifat ilmiah, rasional, empiris, dan sistematis karena penelitian telah ditemukan dalam filsafat ilmu. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2016:193). Penelitian kualitatif menurut ahli di atas, penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk meneliti sebuah objek sebenarnya yang terjadi dilapangan secara ilmiah dan menjadikan sebuah instrumen kunci dalam penelitian tersebut. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap informan yang terdiri dari, 1) Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak, 2) Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, dan 3) Kepala Dinas Kominfo Kota Pontianak.

Hasil dan Pembahasan

Komunikasi (*Communication*)

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan pelaksana. Konsistensi dan keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Pada kebijakan yang telah diterapkan pemerintahan Pontianak ini sudah dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut seperti kepala sekolah dan para guru tetapi pada kenyataannya belum ada pemahaman yang jelas terhadap orang tua dan murid sehingga kurang dapat melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik. Seperti tetap membiarkan anak-anaknya bermain diluar yang seharusnya tetap dirumah saja, dan kurang terdapat pengawasan terhadap orang tua.

Pendidikan adalah salah satu faktor utama bagi penerus bangsa ini, walaupun dalam pandemi COVID-19 tetap perlu upaya agar pendidikan tetap berjalan sesuai mestinya dan tidak menghambat pembelajaran antara pendidik dan juga siswa. Maka dalam hal ini perlu adanya kerja sama antara guru, siswa, orang tua dan juga pemerintah, agar bersama-sama mewujudkan tujuan pendidikan meskipun keadaan yang mengkhawatirkan seperti ini. Dalam keadaan seperti ini mau tidak mau maka proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode online atau E-Learning tanpa tatap muka. Dalam proses pelaksanaan mungkin terdapat hambatan-hambatan yang terjadi karena perbedaan kemampuan seseorang untuk mempunyai akses komunikasi yang digunakan. Dan selama proses pembelajaran daring dilakukan terdapat sisi positif dan negatif yang dirasakan oleh siswa maupun tenaga pendidik

Untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan maka harus mengerti betul apa yang harus dilakukan, selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasi mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sasarannya. Berikut kutipan wawancara yang peneliti lakukan Bersama Bapak Syahdan Aziz selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak, terkait bagaimana pemberian informasi yang diberikan ke sekolah untuk siswa mengenai penerapan proses pembelajaran sistem daring di masa pandemi Covid-19

Dari kami Dinas Pendidikan memiliki beberapa cabang dinas dan nah dari situ kemudian kita menyampaika informasi dengan memberi surat edaran ke cabang dinas kemudian masuk ke sekolah-sekolah yang selanjutnya pihak sekolah yang punya wewenang untuk menyampaikan ke siswa-siswanya. Selanjutnya untuk kebijakannya itu tergantung bidang masing-masing karena ada disitu koordinator kurikulum, dia lihatmi kondisi di sekolahnya. Karena tidak semua anak-anak punya android, karena taraf ekonomi orang tuanya juga berbeda-beda tidak boleh disamakan. Artinya Kembali ke sekolah masing-masing karena tidak bisa juga kita tekanka bilang harus vicon (Video Conference). Kita saja kalau vicon sampai 1 jam bisa habis mi 4GB kuota. Orang tua belum tentu membiayai anaknya dengan pemakaian

kuota banyak dalam tiap hari belajar. Wawancara yang diperoleh dari Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak (28 April 2022).

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas penulis simpulkan bahwa penyaluran komunikasi yang diutarakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak sudah terarah dan jelas, yang pada intinya informasi kebijakan penerapan pembelajaran sistem daring di masa pandemi Covid-19 di serahkan ke sekolah masing-masing dengan melihat kondisi ekonomi siswa.

Searah dengan hasil wawancara penelitian dilapangan, dengan Bapak Fahmi Kurnia Hidayat, selaku Kepala dinas Kominfo Kota Pontianak, sebagai berikut:

Pelaksanaan Komunikasi telah terstruktur, pertama mereka mengikuti himbauan pemerintah pusat, lalu berkoordinasi dengan kepala daerah serta sekolah-sekolah. Bentuk komunikasi adalah menyampaikan kepada sekolah-sekolah agar menerapkan kebijakan pendidikan berbasis daring, itu dilakukan dalam surat edaran tentang pendidikan daring di masa pandemi. Wawancara yang diperoleh dari Kepala Dinas Kominfo Kota Pontianak (29 April 2022).

Komunikasi yang terjadi di jajaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak sudah cukup baik, terlihat dari respon Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak dengan mengeluarkan surat edaran perihal pencegahan covid-19 untuk meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah, bentuk tindak lanjut dari surat edaran Wali Kota Pontianak dalam upaya pencegahan covid-19,

Sumber Daya (Resources)

Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam (Widodo, 2013:98) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan dan aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan atau aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber Daya yang menjadi penentu keberhasilan implementasi tersebut diantaranya Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Waktu, dan Sumber Daya Dana. Pelaksanaan pembelajaran daring ini membutuhkan sumber daya yang mumpuni, namun bukan karena pembelajaran daring di situasi sekarang ini pandemi Covid-19 dapat terlaksana karena Sumber Daya yang sudah mumpuni, karena memang situasi mengharuskan pembelajaran daring tersebut. Dalam pelaksanaannya selama situasi, masih banyak sumber daya yang dibutuhkan, seperti manusia yang kompeten, waktu yang tepat, dan juga dana sebagai akses masuk internet

Berikut kutipan wawancara yang peneliti lakukan Bersama Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pontianak, terkait dengan kondisi sumber daya manusia dan kompetensi Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

Untuk sumber daya manusia dari yang kurang paham terhadap IT misalnya guru, kita sesuaikan juga bagi yang kelahiran 1965 kebawah itu yakin saja susah paham untuk IT (Informasi Teknologi) yang 1970 – an ke atas itu sudah bisami mengfungsikan IT ibaratnya menjangkau ke telekomunikasi. Kalau kelahiran 1965 kebawah kayaknya memang agak susah karena dia sudah hidup di zona nyaman sistem mengajarnya. Palingan bisa sedikit tapi aplikasi yang ringan seperti WhatsApp itu saja pasti didampingi sama anaknya di rumah. Jadi memang ini tantangan untuk kita, tetapi secara tidak langsung dimaklumi saja. Kan sudah ada imbalan sudah ada yang paham dan mulai pintar mengfungsikan. Kalau sudah ada pengarahan dan mau belajar setidaknya mengurangi dari presentasi nya dan ada usaha. Jadi kita Kembali kalau kita tidak bisa melek semua setidaknya sudah adalah kita lakukan perubahan. Wawancara yang diperoleh dari Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pontianak (29 April 2022).

Kemampuan Guru disini dirasa sudah cukup kompetitif yang dimana menjelaskan materi melalui beberapa portal online yang bisa diakses oleh siswa. Tetapi ada Guru yang usianya sudah lanjut kurang mampu menguasai beberapa portal online tersebut yang menjadikan pembelajaran daring kurang efektif. Selain itu sumber daya ini juga berupa sumber daya peralatan yaitu media atau aplikasi yang digunakan. Aplikasi yang digunakan yaitu WA Group, zoom/meet, google classroom, V-learning. Dengan adanya beberapa portal online ini maka memudahkan Guru untuk menyampaikan materi kepada siswa. Materi yang diberikan kepada siswa biasanya dalam bentuk power point ataupun video berjalan dan voice note, serta memberikan tugas-tugas yang digunakan untuk menunjang nilai siswa. Dan pada saat pelaksanaan ujian tengah semester juga dilaksanakan melalui berbagai

macam portal online tersebut sehingga memudahkan satu sama lain dan tidak harus melaksanakan ujian tengah semester dengan tatap muka untuk meminimalisir terjadinya penularan virus covid-19.

Ensiklopedia Webster yang dikutip oleh Fauzi pada tahun 2004, Sumber Daya adalah merupakan sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang. Lebih spesifik Rees dalam (Fauzi, 2004) lebih jauh mengatakan bahwa sesuatu untuk dapat dikatakan sebagai sumber daya harus memiliki dua kriteria yang pertama yaitu harus ada pengetahuan, teknologi atau keterampilan (skill) untuk memanfaatkannya dan yang kedua adalah harus ada permintaan (demand) terhadap sumber daya tersebut. Dari pengertian tersebut telah menggambarkan bahwa Sumber Daya juga menjadi salah satu tolak ukur penentuan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan. Dalam konteks penelitian ini maka poinnya adalah bagaimana kemampuan sumber pemerintah daerah Kota Pontianak di bidang pendidikan dalam pelaksanaan metode belajar daring di masa pandemi.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa kendala dalam aspek sumber daya hanya berasal dari belum meratanya jangkauan akses internet sehingga jika listrik padam maka internet juga ikut mati. Ini salah satu kendala dalam proses belajar daring. Kendala yang dialami saat melaksanakan kebijakan pembelajaran daring, seperti keterbatasan akses jaringan internet di beberapa wilayah di kota Pontianak, dengan adanya pembelajaran daring ini juga bisa memberatkan orang tua siswa karena harus mempunyai gadget beserta kuota internet untuk mengaksesnya. Ada beberapa Siswa yang kesulitan dalam mengakses materi yang diberikan secara onlinen karena tidak memiliki kuota

Disposisi (*Disposition*)

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah salah satu faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Sikap ini juga dapat diartikan sebagai karakteristik dari pelaksana kebijakan yang bereperan penting untuk mewujudkan keberhasilan sebuah kebijakan. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Dalam kebijakan ini sikap yang ditunjukkan dari implementor cukup positif, dimana terbukti dengan para ASN ataupun PNS yang dalam melaksanakan kebijakan tersebut mematuhi segala prosedur yang ada. mereka cenderung mendukung kebijakan tersebut, karena mereka sadar pentingnya kebijakan tersebut dalam mengatasi pandemi Covid 19 ini.

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Dalam melaksanakan pembelajaran pada saat keadaan yang seperti sekarang ini, perlu adanya komitmen dan sikap kemauan dari setiap individu atau pelaksanaan kebijakan, karena mau tidak mau jika dalam kondisi seperti ini pendidikan tidak berjalan maka tujuan yang sudah disusun atau ditetapkan berdasarkan Undang-undang akan terhalang. Dengan adanya kepedulian antar sesama pembuatan kebijakan dan pelaksana maka kebijakan tersebut akan menjadi mudah dijalani dan akan menemukan letak keberhasilannya.

Dalam penelitian ini fokusnya adalah siapa yang memberikan arahan dalam Implementasi Kebijakan pendidikan daring. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pontianak, sebagai berikut:

“Pertama adanya surat adaran dari Walikota, kemudian direspon oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak dengan mengeluarkan surat edaran perihal pencegahan covid-19 dengan meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah dan mengintruksikan untuk belajar di dalam rumah. surat edaran tersebut memuat tentang himbau pembelajaran daring dan luring di sekolah-sekolah” Wawancara yang diperoleh dari Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pontianak (29 April 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pontianak menunggu perintah dari Walikota Pontianak dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan berbasis daring. Menurut hemat berpikir peneliti hal itu sudah baik. Kondisi ini tidak mengalami masalah dilapangan. Pada prinsipnya menurut peneliti aspek Disposisi telah telaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah Kota Pontianak dalam melaksanakan proses belajar daring dan luring, ini adalah contoh baik bagi daerah lain di Provinsi Kalbar.

Struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini meliputi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme dalam pembelajaran daring ini tidak ada aturan tertulis yang jelas, yang dimana mekanisme pembelajaran merupakan kesepakatan antara Guru dan siswa baik itu jam perpembelajaran an maupun menggunakan portal online apa yang digunakan dalam media pembelajaran. Menurut (Edward III dalam Agustino 2006), bahwa struktur birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Berikut hasil wawancara penulis dengan Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pontianak:

“Jadi stuktur nya dari sekretariat itu diarahkan ke Kebijakannya tergantung bidang masing-masing karena ada disitu kordinator kurikulum, jadi dia lihat, tempatnya sekolah masing-masing. Karena tidak semua anak-anak itu punya android. Kemudian di lanjutkan kalau kita design nya di sini, Kita lihat dulu aturan dari permendikbud, itu sebagai sumber membuat SOP nya.” Wawancara yang diperoleh dari Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pontianak (30 April 2022).

Dalam strukur birokrasi ini dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu dari Standar Operasioal Prosedur dan Fragmentasi yang dijalankan. Secara SOP, dalam hal ini menggunakan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona virus Disease (Covid- 19). Surat edaran ini berisi mengenai proses diselenggarakannya kegiatan belajar di rumah yaitu sebagai berikut: a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh 100 capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan b. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid19. c. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah. d. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan baik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/ nilai kuantitatif.

Kemudian secara fragmentasi, yaitu terkait dengan distribusi tanggung jawab didalam kebijakan belajar dirumah ini adalah pemerintah Kota Pontianak dan dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pontianak bertanggung jawab sebagai pelaksana/implementator yang tetap berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Pontianak dan dibawah naungan dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pontianak. Mereka memastikan kelancaran kegiatan belajar dirumah secara optimal dan menjawab berbagai kendalakendala yang terjadi selama implementasi kebijakan ini. Secara tanggung jawab kegiatan belajar dirumah selama ini, diberikan kepada masing-masing sekolah sesuai dengan kondisi daerah dan sekolah masing-masing.

Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya penyelenggaraan pembelajaran daring ditengah wabah covid-19 yang belum selesai ini sangat membantu Siswa dalam perpembelajaran sehingga tidak menyebabkan Siswa untuk datang secara langsung ke kampus untuk mendapatkan materi. Perpembelajaran secara daring ini bisa diakses melalui beberapa portal online seperti WA, Google Classroom, Zoom dll. Komunikasi yang terjadi di jajaran Pemerintah Kota Pontianak sudah cukup baik, terlihat dalam penerbitan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kota Pontianak dalam upaya pencegahan covid-19, selanjutnya di respon oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak dengan mengeluarkan surat edaran perihal pencegahan covid-19 dengan meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah dan mengintruksikan untuk belajar di dalam rumah. Ada beberapa kendala yang dialami saat melaksanakan kebijakan pembelajaran daring, seperti keterbatasan akses jaringan internet di beberapa wilayah di kota Pontianak, dengan adanya pembelajaran daring ini juga bisa memberatkan orang tua siswa karena harus mempunyai gadget beserta kuota internet untuk mengaksesnya. Ada beberapa Siswa yang kesulitan dalam mengakses materi yang diberikan secara onlinen karena tidak memiliki kuota. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Implementasi Kebijakan menurut George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari semua aspek tersebut sudah terlaksana dengan baik. Tetapi ada beberapa aspek yang harus dibenahi untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran daring yang lebih efisien dan efektif.

Referensi

- Arwidayanto, Arifin, Warni. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif. Bandung: Cendekia Press
- Abdurrahman. 1987. Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah. Jakarta : Media Sarana PressAulia

- Alfirzan,dkk.2021.Kebijakan Pendidikan, Implementasi Kebijakan Pendidikan. Padang: Jurnal Pendidikan Tambusai
- Azis, A. (2017). Manajemen Perumusan Kebijakan Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, 12(2), 181-195.
<http://dx.doi.org/10.19105/tjpi.v12i2.1377>
- Ali. 1995. Kebijakan Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara Kebijakan Pendidikan di Indonesia
- Aulia Alfirzan,dkk.2021.Kebijakan Pendidikan, Implementasi Kebijakan Pendidikan. Padang: Jurnal Pendidikan Tambusai
- Creswell, J. W. (2016). Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Google Scholar
- Costantina, Yustika Caprilin. 2018. "Model Pengambilan Kebijakan Sekolah Di SDN Grobogan 2 Madiun." Muslim Heritage 2(2): 235. Goolge Scholar
- Datuk, A. (2020). Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua untuk Mendapatkan Pendidikan Anak yang Bermutu di Kota Kupang. Attractive: Innovative Education Journal. 2 (2): 20-33
- Dewi, R. (2017). Studi Kasus Penolakan Publik Atas Kebijakan Publik. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 5(1), 6-12.
<https://doi.org/10.31289/publika.v5i1.1165>
<https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>
- Darwis. 2013. "Formulasi Kebijakan Pendidikan Gratis Kabupaten Pelalawan Tahun 2013." Jom FISIP 2(13): 1–13. Google Scholar
- Dye, Thomas R. 2011. Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice Hall. Google Scholar
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Jogjakarta. Gajah Mada University Press Yogyakarta
- Dye, Thomas R. 1987, *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 6th
- Edi Ismanto, Melly Novalia, Pratama Benny Herlandy, (2017), Pemanfaatan Smartphone Android Sebagai Media Pembelajaran Bagi Guru SMA Negeri 2 Kota Pekanbaru. Jurnal untuk Mu Negeri. 1 (1): 42-47.
- Hasbullah, 2015. Kebijakan Pendidikan dalam perspektif teori, Aplikasi dan Kondisi obyektif Pendidikan di Indonesia. Jakarta : Rajawali Press
- H.Yuningsih,2015.Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru,UIN Bandung: Jurnal Pendidikan Islam Imron , Iskandar, Wahyu. 2019. "Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Herni Ari Subekti, Nubaiti, Masilawati, Happy Fitria, (2020), Pemanfaatan Video Conference Sebagai Media Pembelajaran Interaktif pada Mata Pelajaran Produktif di Sekolah Menengah Kejuruan. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang. 10 Januari 2020: 427-437.
- I Wayan Cong Sujana. (2019). Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia, Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar. 4 (1): 29-39.
- L, IDRUS, 'Evaluasi Dalam Proses Pembelajaran', Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 9.2 (2019), 920–35
- Meilina, Duwi, Irawan Sunoro, and Sowiyah. 2019. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sma Negeri 1 Kasui Way Kanan." Jurnal 53(9): 1689–99. Google Scholar
- Muhdi, Muhdi, Nurkolis Siri Kastawi, and Suwarno Widodo. 2017. "Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah." Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan 4(2): 135.
<https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p135-145>
- Munadi, Muhamaad, and Barnawi. 2011. Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan.Jogyakarta: Arruzmedia..
- Mahmudah, M., Kapi, M. B., & Muslimah, M. (2021). Parental Participation-Based Portfolio Assessment during Covid-19 Pandemic. Bulletin of Science Education. 1 (1): 1-6.
- Mujianto Solichin. (2015). Implementasi Kebijakan pendidikan dan peran birokrasi, Religi. Jurnal Studi Islam. 6 (2): 148-178
- Muhammad Ali. 2017. Kebijakan Pendidikan menengah dalam perspektif governance di Indonesia. Malang: Universitas Brawijaya Press
- Mispani, M., & Jannah, S. R. (2021). The Influence of Discipline and Performance of Teachers' Akidah Akhlak on Student Achievement in Madrasah Aliyah. Bulletin of Pedagogical Research: 1 (1): 46-53.
- Munir, Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Bandung: Alfabeta CV, 2009)
- Ni'mah, Faiqotul Izzatin, 'Manajemen Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning) Pada Homeschooling "Sekolah Dolan"', Manajemen Pendidikan, 25.1 (2016), 112–19
- Nugroho, D. Riant. 2000. Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi. Jakarta : PT Elex Media Computindo

- Nurina, A. I., & Khamid, A. (2021). Parenting for Mother's Careers for Children during Covid-19 in Islamic Education. *Bulletin of Science Education*. 1 (1): 76-82.
- Noeng Muhadjir. (2010). *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan CoronaVirus Disease 2019
- Rina Tri Handayani, Dewi Arradini, Aquartuti Tri Darmayanti, Aris Widiyanto, Joko Tri Atmojo, (2020). Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, dan Herd Immunity. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*. 10 (3): 373- 380.
- Rosda Karya Nurtanio, Agus Purwanto. 2008, *Perjalanan Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Yogyakarta, Jurnal Manajemen Pendidikan
- Rosma, 2020, "Latar Belakang Virus Corona, Perkembangan hingga Isu Terkini", <https://news.detik.com/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-corona-perkembangan-hingga-isuterkini>, Diakses Pada 1 Mei 2022
- Supardi U.S. 2012. *Arah Pendidikan di Indonesia dalam tataran Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Jurnal Ilmiah Pendidikan
- Suryono, Yoyon. 2000. *Arah Kebijakan Otonomi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta. FIP UNY
- Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran corona Virus Disease (Covid-19).
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta Pramudiana, ID. 2017. *Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Surabaya: Jurnal UNITOMO Widya
- Sari, dkk. 2020. *Analisis Kebijakan Pendidikan terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh*. Jurnal Mappesona Z. Sudarto. 2016. *Implementasi Kebijakan penyelenggaraan Pendidikan*. Surabaya: Jurnal UNES
- Taufiqurrahman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Taufik, Ali, 'Perspektif Tentang Perkembangan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur', *Jurnal Pendidikan & Konseptual*, 3.2 (2019), 88–98
- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. (2010). *Kebijakan Pendidikan*, Jakarta: Pustaka Pelajar
DOI: <https://doi.org/10.32502/amp.v4i1.3338>
- Wahab, solichin Abdul, 2001. *Pengantar Kebijakan Negara*. Rhimena Cipta : Jakarta.
- .